

Kolonialisme dan Korupsi

SAAT ini bangsa Indonesia memasuki tahun ke-70 kemerdekaan. Obrolan-obrolan reflektif pada setiap malam tirakatan 17 Agustus lazimnya menyangkut perjuangan panjang segenap komponen bangsa dalam melawan kolonialisme Belanda. Kolonialisme yang menghisap aneka sumber daya dan menginjak-injak martabat kemanusiaan yang telah berlangsung lama menjadi bahan perbincangan yang hangat. Suasana makin hangat manakala peserta tirakatan berusaha memahami romantika revolusi pasca proklamasi. Semangat juang pantang menyerah, dengan ungkapan-ungkapan heroiknya, seperti: *Patah tumbuh hilang berganti, Mati satu tumbuh seribu, dan Merdeka atau mati*, menjadi bahan refleksi yang menarik.

Inti dari setiap refleksi kemerdekaan tidak terbatas pada rasa syukur bahwa bangsa ini telah merdeka dan terbebas dari kolonialisme, tetapi juga dan terutama tak seorangpun ingin dibelenggu, dihisap, ditindas, dan melarat karenanya. Dalam suasana kemerdekaan, setiap orang ingin hidup bahagia dan sejahtera. Ketika kolonialisme secara fisik telah mengakhiri otoritas otoriternya, perbincangan reflektif malam tirakatan 17 Agustus berlanjut ke episode Indonesia pasca revolusi. Selain kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan, percakapan akan mencapai suasana terhangatnya ketika menyangkut aneka persoalan krusial kontemporer yang dihadapi oleh bangsa ini.

Bila panitia tirakatan mengarahkan puncak perbincangan pada isu krusial, maka hampir bisa dipastikan isu korupsi akan mengemuka. Sebelum merdeka ada kolonialisme, setelah merdeka ada korupsi. Pernyataan faktual ini tidak hanya menunjukkan bahwa korupsi telah sedemikian menggurita, tetapi

Oleh: Anton Haryono

juga mengenai bahayanya yang sepadan atau bahkan melebihi kolonialisme. Sama seperti kolonialisme, korupsi dipahami sebagai tindakan anti kemanusiaan yang memiliki kekuatan membelenggu, menghisap, menindas, dan membikin langgengnya kemiskinan.

Untuk masa revolusi, ungkapan-ungkapan *Patah tumbuh hilang berganti, Mati satu tumbuh seribu, dan Merdeka atau mati!* mengandung pesan tentang vitalitas perjuangan. Meskipun banyak korban berjatuhan, tidak ada kata menyerah terhadap niat jahat Belanda yang hendak mengangkangi kembali ibu pertiwi. Hasilnya, sangat gemilang: Belanda hengkang dan mengakui kedaulatan Indonesia. Oleh karena itulah jasa para kusuma bangsa senantiasa kita kenang, apalagi di tengah-tengah kegeraman dalam menghadapi merajalelanya korupsi (plus kolusi dan nepotisme).

Pemberantasan korupsi terus dilakukan dan pada masa-masa terakhir menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, korupsi masih jauh dari kata terberantas habis. Korupsi jalan terus, *Patah tumbuh hilang berganti, Mati satu tumbuh seribu*. Bahkan karena sedemikian maraknya, korupsi seolah-olah merupakan jalan yang harus ditempuh, *Korupsi atau mati!*. Melawan kolonialisme telah menunjukkan hasilnya, melawan korupsi masih membutuhkan langkah-langkah kongkret heroiknya. Sama seperti melawan kolonialisme, melawan korupsi pun perlu daya juang yang tinggi.

Baik kolonialisme maupun korupsi, rakyat banyak (wong cilik) lah yang menjadi korban. Di balik korupsi terdapat penyalahgunaan wewenang, yang dengan sendirinya terjadi perampasan hak. Selain me-

langgar hukum, korupsi memiliki karakter asosial. Subjek hidup seolah-olah hanya milik para koruptor. Ketika mereka adalah para pemegang kuasa, maka berjalannya kekuasaan bertumpu pada relasi subjek-objek. Relasi ini bersifat eksploitatif, sehingga tidak ada bedanya dengan kolonialisme.

Pada pesta 70 tahun Indonesia merdeka, kita perlu mengingat kembali bahwa arah yang hendak dituju oleh bangsa ini adalah negara kesejahteraan. Namun, dengan merajalelanya korupsi, bagaimana mungkin negara kesejahteraan dapat diwujudkan. Besarnya jumlah uang yang dikorup akan menentukan tingkat keterbatasan pengupayaan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tidak aneh bila pada saat yang sama korupsi menggila akan tetapi pembangunan infrastruktur sangat buruk.

Korupsi juga merupakan jalan lapang bagi terjadinya pembangunan salah sasaran. Dalam konteks ini, yang menjadi pertimbangan bukan aspek kemampuannya bagi orang banyak, melainkan seberapa besar uang bisa digelapkan.

Buruknya infrastruktur kesejahteraan ataupun pembangunan salah sasaran yang erat mengait dengan korupsi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari pola relasi subjek-objek dalam kekuasaan. Wajar bila kemudian penegakan hukum pun cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Kolonialisme secara fisik telah lama kembali ke negeri asalnya. Akan tetapi, sifat-sifat yang melekat di dalamnya masih tertinggal di negeri ini dan diambil alih oleh para pemburu kuasa korup dengan suka cita. Mereka tidak sadar bahwa korupsi seahakekat dengan penindasan. Mereka lupa atau pura-

pura lupa bahwa korupsi tidak dibenarkan dari segi apapun, kecuali oleh nafsu jahatnya.

Dapatkah korupsi diatasi? Bila tidak bisa diatasi, maka tidak pernah akan ada negara yang nyaris tanpa korupsi. Bukankah korupsi di negeri ini sudah sedemikian akut? Paling tidak, upaya-upaya mutakhir menunjukkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Penguatan penegakan hukum merupakan keharusan untuk mengoptimalkan pemberantasan. Langkah ini menyaratkan keberdayaan masyarakat sipil yang kuat agar dapat melakukan pengawasan dan tekanan-tekanan dalam pelaksanaannya. Revolusi nasional 1945-1949 bisa dimenangkan berkat kekuatan rakyat, maka hal yang sama berlaku untuk pemberantasan korupsi.

Pada ranah preventif berjangka panjang, pendidikan anti-korupsi sejak usia dini perlu digalakkan melalui berbagai program strategis berkelanjutan. Bahaya korupsi bagi kehidupan bersama harus dipahami kan secara komprehensif sekaligus mendalam. Kesentausaan dan keberlanjutan bangsa ini bagaimanapun akan turut ditentukan oleh kemampuannya dalam menangkal korupsi. Perlu disadari bahwa dampak korupsi yang menggurita tidak hanya bersegi ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.

Negara dibangun dalam rangka kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, marilah kita secara tegas mengatakan tidak untuk korupsi, setegas leluhur kita dulu ketika mengatakan "tidak" untuk kolonialisme. Melawan kolonialisme merupakan jalan kemerdekaan, melawan korupsi merupakan jalan kesejahteraan. ***

Dr. Anton Haryono MHum, Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.